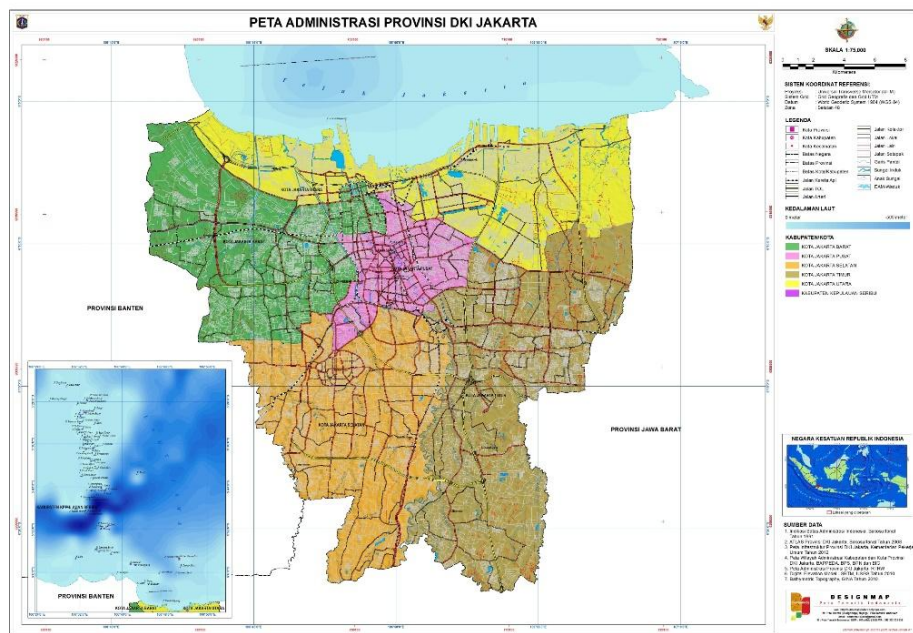


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Google.com

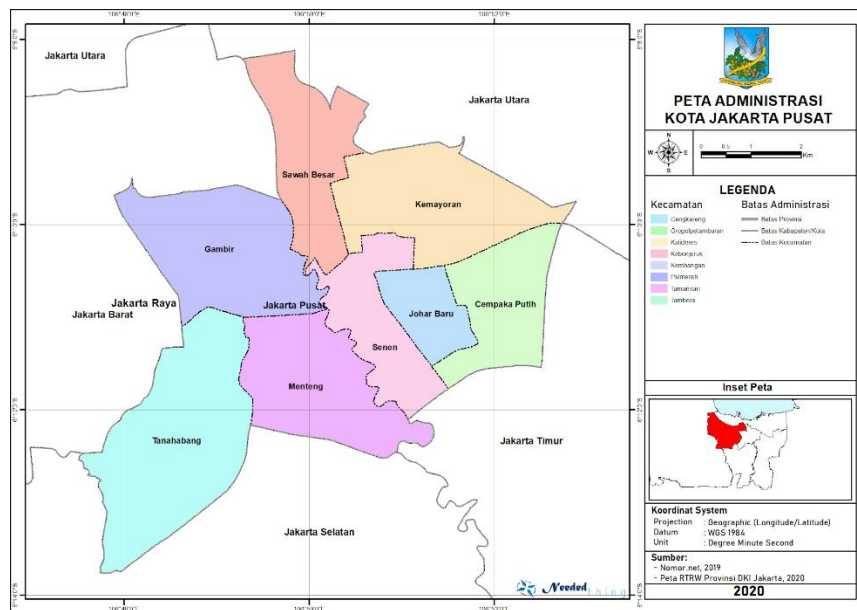
Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Luas daratan Provinsi DKI Jakarta mencapai 661.52 km<sup>2</sup>, dengan jumlah lautan yang sekitar 6.977,5 km<sup>2</sup>, dan juga mempunyai sekitar 110 pulau yang terdapat di Kepulauan Seribu. Apabila dilihat secara administratif, dibagian Utara Provinsi DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sedangkan dibagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok. Selanjutnya, dibagian sebelah Timur wilayah Provinsi DKI Jakarta tersebut berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi dan dibagian Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Provinsi DKI Jakarta mencakup sejumlah Kabupaten serta Kota Administrasi, yakni Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota

Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

## 2.2 Gambaran Umum Kota Jakarta Pusat

Gambar 2.2

### Peta Administrasi Kota Jakarta Pusat



Sumber: Google.com

Kota Jakarta Pusat merupakan salah satu dari lima kota administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang terletak di wilayah Jakarta bagian tengah. Luas wilayah Kota Jakarta Pusat ialah sebesar 48,13 km<sup>2</sup> atau setara 7,25 % dari total luas keseluruhan DKI Jakarta. Letak wilayah dari Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di tengah dan diapit oleh seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta lainnya. Jakarta Pusat berfungsi sebagai pusat dari pemerintahan dan bisnis bagi Kota Jakarta bahkan hingga tingkat nasional secara keseluruhan. Wilayah ini mencakup lokasi dari istana negara, Balaikota Jakarta, serta berbagai kegiatan bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah ini dikenal dengan julukan sebagai pusat pemerintahan ibu kota negara, ibu kota provinsi DKI Jakarta, dan pusat bisnis

Indonesia. Secara administratif, wilayah ini memiliki 8 (delapan) Kecamatan dan 44 (empat puluh empat) Kelurahan.

## **2.3 Gambaran Umum Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI**

### **2.3.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI**

Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu unsur penunjang DPD. Unsur ini berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga yang memiliki fungsi kesekretariatan organisasi. Setjen DPD RI bertanggung jawab kepada pimpinan DPD RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara struktural, Setjen DPD RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI berada di Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta.

Setjen DPD RI berfungsi sebagai unsur pendukung dan penggerak utama bagi DPD RI. Secara umum tugas dari lembaga ini ialah menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian guna menjamin kelancaran pelaksanaan wewenang maupun tugas DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan serta evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal.
- b. Koordinasi serta pembinaan terhadap penerapan tugas unit organisasi Sekretariat Jenderal.
- c. Perumusan kebijakan, pembimbingan, serta penyelenggaraan dukungan persidangan bagi DPD RI.
- d. Perumusan kebijakan, pembimbingan, serta penyelenggaraan dukungan administrasi bagi DPD RI.
- e. Penyelenggaraan dukungan administratif serta teknis kepada DPD RI di daerah pemilihan.

- f. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan internal Sekretariat Jenderal.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas serta fungsi kepada Pimpinan DPD RI.
- h. Penyelenggaraan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh DPD RI.

### **2.3.2 Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPD RI**

Sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai visi yaitu "Sistem Pendukung yang profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI."

Sejalan dengan visi yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Sekretariat Jenderal DPD RI adalah:

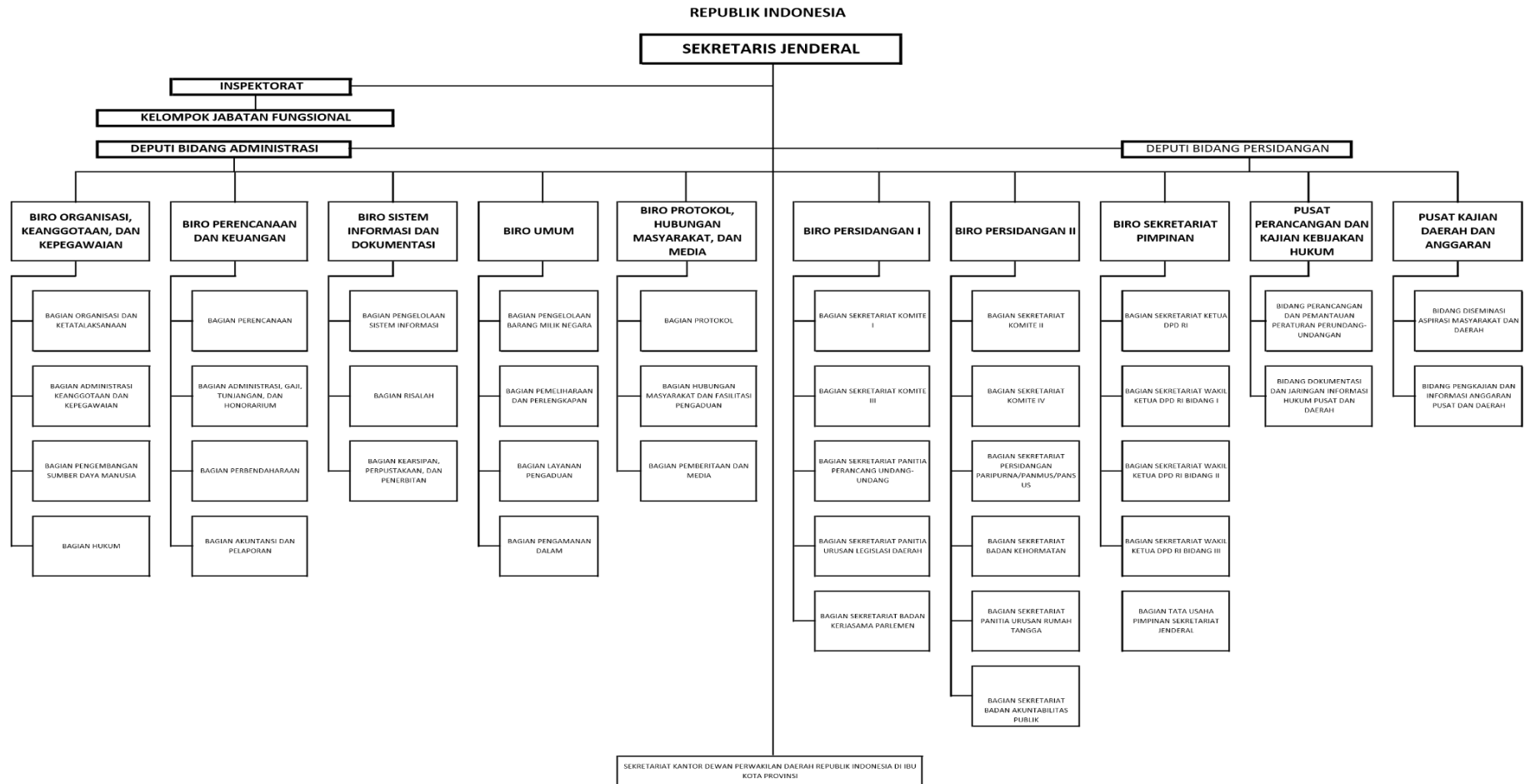
1. Meningkatkan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI.
2. Meningkatkan dukungan administratif dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI.

### **2.3.3 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI**

Sekretariat Jenderal DPD RI melipti 2 Kedeputian (Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan) dan 1 Inspektorat. Setiap Kedeputian memiliki 5 Biro/Pusat dibawahnya. Setiap Biro/Pusat tersebut memiliki Bagian dibawahnya dan setiap bagian juga memiliki subbagian dibidangnya.

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI



### **2.3.3.1 Deputi Bidang Administrasi**

Deputi Bidang Administrasi merupakan unsur deputi yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan serta menyelenggarakan memberikan pelaksanaan dukungan administrasi bagi DPD RI. Guna melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Administrasi ini memiliki beberapa biro dibawah naungannya yang membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Dan beberapa biro tersebut juga memiliki bagian dan subbagian dibawahnya. Berikut adalah biro yang ada di Deputi Bidang Administrasi :

#### **1. Biro Orgaisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian**

Biro Orgaisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian atau biasa disingkat dengan Biro OKK ini memiliki tugas yang berfokus kepada organisasi, anggota, dan kepegawaian seperti menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, hukum, serta pelaksanaan dukungan di bidang organisasi dan tata laksana Sekretarian Jenderal DPD RI. Biro OKK ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a) Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan
- b) Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian
- c) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d) Bagian Hukum.

#### **2. Biro Perencanaan dan Keuangan**

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan biro yang fokusnya menyelesaikan permasalahan dibidang keuangan seperti pengelolaan keuangan, pelaksanaan dukungan pada bidang perencanaan program serta anggaran, administrasi gaji, tunjangan, honorarium, akuntansi maupun pelaporan DPD RI serta Sekretariat Jenderal DPD RI.

#### **3. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi**

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan Biro SINDOK yaitu biro yang mempunyai tugas membantu melaksanakan dukungan pada bidang sistem informasi, risalah, kearsipan, perpustakaan,

serta penerbitan. Biro SINDOK meliputi Bagian Pengelolaan Sistem Informasi, Bagian Risalah, serta Bagian Kearsipan, Perpustakaan, serta Penerbitan.

4. Biro Umum

Biro Umum adalah biro yang berfungsi untuk membantu pengerjaan dukungan pada bidang pengelolaan Barang Milik Negara, pemeliharaan, layanan pengadaan, sarana serta prasarana rapat.

5. Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media

Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media yang dapat disingkat juga dengan Biro PHM merupakan biro yang berfungsi untuk menyelesaikan dan membantu pengerjaan dukungan pada bidang keprotokolan, fasilitas pengaduan, hubungan masyarakat, serta media.

### **2.3.3.2 Deputi Bidang Persidangan**

Deputi Bidang Persidangan merupakan Deputi kedua yang ada di Kantor Setjen DPD RI selain Deputi Bidang Administrasi. Seseorang atau jabatan yang memimpin di Deputi Bidang Persidangan disebut dengan Deputi. Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan serta pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPD RI. Untuk menyelesaikan tugasnya, Deputi Bidang Administrasi ini memiliki beberapa biro/pusat dibawah naungannya yang membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Berikut adalah biro/pusat Deputi Persidangan:

1. Biro Persidangan I
2. Biro Persidangan II
3. Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan yang juga biasa disebut dengan Biro SETPIM merupakan biro yang bertugas untuk membantu pengerjaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI serta Pimpinan Sekretariat Jenderal.

4. Pusat Perancangan dan Kebijakan Hukum

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan atau biasa disingkat dengan PUSPERJAKUM yaitu pusat maupun biro yang berfokus pada penyelesaian permasalahan pada bidang hukum.

5. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran atau biasa disingkat dengan PUSKADARAN yaitu pusat maupun biro yang bertugas melaksanakan dukungan pada bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi Masyarakat maupun daerah, serta anggaran pada DPD RI.

### **2.3.3.3 Inspektorat**

Inspektorat unsur atau unit terakhir yang ada di Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI sekaligus juga melengkapi unsur/unit sebelumnya yaitu Deputy Bidang Administrasi dan Deputy Bidang Persidangan. Inspektur merupakan nama jabatan yang memimpin Inspektorat. Tugas dari Inspektorat ini ialah mengerjakan pengawasan intern di lingkungan Setjen. Inspektorat juga memiliki beberapa unit dibawahnya yang membantu menyelesaikan tugasnya, namun sedikit berbeda karena jumlahnya yang lebih sedikit yaitu Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.